

**ANALISIS UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI DAN PENERAPAN HUKUMNYA DALAM PERSPEKTIF
*ECONOMIC ANALYSIS OF LAW***

TESIS

Untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Derajat
Magister Hukum (M.H)



OLEH:

NAMA : HASBI ASH SIDDIQI, S.H.
NO. POKOK MHS : 16192019
BKU : SISTEM PERADILAN PIDANA

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2019**

**ANALISIS UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI DAN PENERAPAN HUKUMNYA DALAM PERSPEKTIF
*ECONOMIC ANALYSIS OF LAW***

TESIS

Untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Derajat
Magister Hukum (M.H)



OLEH:

NAMA	: HASBI ASH SIDDIQI, S.H.
NO. POKOK MHS	: 16192019
BKU	: SISTEM PERADILAN PIDANA

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
dan dinyatakan LULUS pada hari Rabu, 23 Januari 2019**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2019**



**ANALISIS UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI DAN PENERAPAN HUKUMNYA DALAM PERSPEKTIF
*ECONOMIC ANALYSIS OF LAW***

Oleh :

Nama Mhs. : **Hasbi Ash Siddiqi, S.H.**
No. Pokok Mhs. : **16192019**
BKU : **Sistem Peradilan Pidana**

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum**

Pembimbing

Hanafi Amrani, S.H., M.H., L.L.M., Ph.D.

Yogyakarta, 17 Desember 2018

**Mengetahui
Ketua Program Magister (S-2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia**

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.



**ANALISIS UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI DAN PENEGAKAN HUKUMNYA DALAM
PERSPEKTIF *ECONOMIC ANALYSIS OF LAW***

Oleh :

Nama Mhs. : **Hasbi Ash Siddiqi, S.H.**
No. Pokok Mhs. : **16192019**
BKU : **Sistem Peradilan Pidana**

**Telah diajukan dihadapan Tim Penguji dala Ujian Akhir/Tesis
Dan dinyatakan LULUS pada hari Rabu, 23 Januari 2019**

Pembimbing

Hanafi Amrani, S.H., M.H., L.L.M., Ph.D.

Yogyakarta, 23 JANUARI 2019

Anggota Penguji 1

Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H.

Yogyakarta, 23 JANUARI 2019

Anggota Penguji 2

Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H.

Yogyakarta, 23 JANUARI 2019

Mengetahui
Ketua Program Magister (S-2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

MOTTO

*“selalu ada harapan bagi orang yang berdo’a dan
selalu ada jalan bagi orang yang berusaha”*

*“sukses itu tidak akan pernah terwujud hanya
dengan kata melainkan dengan sebuah tindakan, dan
sukses itu tidak dibangun dalam sehari namun
dibangun setiap hari”*

*“saat Allah mendorongmu ke sebuah tebing, yakinlah
kalau hanya ada dua kemungkinan yang akan terjadi,
mungkin Ia akan menangkapmu atau mungkin Ia ingin
kau belajar bagaimana caranya terbang”*

PERSEMBAHAN

Karya tulis ini saya persembahkan untuk:

Negara Republik Indonesia

**Almamater Tercinta Program Studi Magister Ilmu Hukum
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta**

**Kedua Orang Tua Yang Menjadi Pahlawan Bagiku
Drs. Mas'ud Yusuf, S.H.
Mahnep, S.Pd.**

**Keempat Saudari Kesayanganku
Niryani, S.Pd.
Zulhairi, S.Kep.
Yulianti Kusumastuti, S.Pd.
Ristina Wahyu Astuti, S.E.**

Semua Keluarga Besar Yang Ada Di Lombok

Kekasih Tercinta Insantri Aulia, S.Pd.

Semua Sahabat dan Teman-Temanku

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hasbi Ash Siddiqi, S.H.**
NPM : **16192019**
BKU/Jurusan : **Sistem Peradilan Pidana**
Judul Tesis : **Analisis Undang-Undang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi Dan Penerapan Hukumnya
Dalam Perspektif *Economic Analysis Of Law***

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi khususnya di Indonesia dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu didalam naskah ini dapat disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan sebenarnya dan dapat dipertanggung jawabkan.

Yogyakarta, 5 November 2018



Hasbi Ash Siddiqi, S.H.
16192019

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Yang telah memberi karunia, kesehatan, kekuatan, dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Analisis Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Penerapan Hukumnya Dalam Perspektif *Economic Analysis Of Law*”. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan pada Baginda Nabi Muhammad SAW, pembawa cahaya bagi semesta alam.

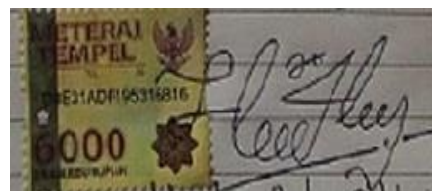
Tesis ini disusun sebagai salah satu persyaratan kelulusan dalam memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum (S-2) pada Program Pascasarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Tesis ini dapat penulis selesaikantidak lepas dari bantuan beberapa pihak, baik berupa dukungan spritual maupun materil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak **Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.** selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak **Dr. Abd. Jamil, S.H., M.H.** selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
3. Bapak **Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.** selaku Ketua Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
4. Bapak **Hanafi Amrani, S.H., M.H., L.L.M., Ph.D.** selaku Dosen Pembimbing, terima kasih sebesar-besarnya atas saran dan masukannya serta perbaikan untuk karya tulis ini.

5. Bapak **Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H.** selaku Dosen dan Penguji karya tulis ini.
6. Bapak **Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H.** selaku Dosen dan Penguji karya tulis ini.
7. Bapak dan Ibu dosen Pascasarjana Hukum UII yang selama ini telah memberikan ilmu kepada penulis.
8. Segenap pengelola Perpustakaan Hukum UII dan Pascasarjana Hukum UII yang telah menjadi tempat singgah untuk menyelesaikan karya tulis ini.
9. Almamater Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dalam kaidah ilmu pengetahuan, tidak pernah dikenal kata sempurna pada setiap karya, selalu terdapat penyempurnaan pada setiap perubahan metode dan ilmu pengetahuan. Begitu juga dengan karya tulis ini. Oleh karena itu dengan penuh rasa hormat, penulis menerima kritik dan saran dari pembaca. Semoga karya tulis ini dapat menambah kekayaan ilmu anak bangsa dan bermanfaat bagi semua pihak yang menggunakan.

Yogyakarta, 31 Januari 2019



Hasbi Ash Siddiqi, SH.
16192019

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pernyataan Lulus.....	ii
Halaman Persetujuan	iii
Halaman Pengesahan	iv
Halaman Motto	v
Halaman Persembahan	vi
Halaman Pernyataan Orisinalitas.....	vii
Halaman Kata Pengantar.....	viii
Halaman Daftar Isi.....	x
Halaman Daftar Tabel.....	xii
Halaman Abstrak	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	7
C. Manfaat Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka.....	9
E. Landasan Teori atau Doktrin.....	11
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan.....	23
 BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG ATURAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF <i>ECONOMIC ANALYSIS OF LAW</i>	 25
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi.....	25
1. Tindak Pidana Korupsi.....	25
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi.....	34
3. Dasar Konsepsi Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi.....	40
4. Pidana dan Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi	58
B. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Guna Mengatasi Masalah Korupsi.....	66
C. Analisis Ekonomi terhadap Hukum dalam Mengatasi Korupsi ..	71
1. Pengertian Analisis Ekonomi terhadap Hukum.....	73
2. Sejarah Singkat dan Perkembangan Analisis Ekonomi terhadap Hukum.....	75
3. Prinsip-Prinsip Analisis Ekonomi terhadap Hukum.....	78

BAB III : PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP <i>ECONOMIC ANALYSIS OF LAW</i> DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENERAPAN HUKUMNYA.....	82
A. Mengkaji <i>Ius Constitutum</i> Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Penerapan Hukumnya dalam Perspektif <i>Economic Analysis of Law</i>	82
1. Korupsi Merugikan Keuangan Negara.....	88
2. Pengembalian Kerugian Keuangan Negara.....	104
3. Korupsi Suap	107
4. Gratifikasi dan Sistem Pembuktian Terbalik.....	120
B. Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Korupsi Sebagai <i>Ius Constituendum</i> dalam Perspektif <i>Economic Analysis of Law</i>	126
1. Kebijakan Formulasi dalam Rumusan Pasal	132
a. Menentukan Jumlah Kerugian Keuangan Negara	134
b. Pasal 2 dan Pasal 3 Lebih Tepat Menjadi Delik Formil	138
c. Merubah Ketentuan Pasal 4	139
d. Menjadikan Kerugian Keuangan Negara sebagai Hutang	140
e. Memperluas Jangkauan Pasal 18 huruf b	141
f. Menjadikan Ketidakberhasilan Terdakwa Dalam Sistem Pembuktian Terbalik Sebagai Alat Bukti Yang Kuat	142
2. Kebijakan Formulasi Bentuk Sanksi Pidana	143
a. Mengefektifkan dan Mengintensifkan Pidana Mati.....	144
b. Formulasi Pidana Denda.....	146
BAB IV : PENUTUP	152
A. Kesimpulan	152
B. Rekomendasi.....	154

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rekapitulasi Tindak Pidana Korupsi Tahun 2012-2017	2
Tabel 2. Putusan Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Korupsi	6
Tabel 3. Tinjauan Pustaka	9
Tabel 4. Klasifikasi Tindak Pidana Korupsi	30
Tabel 5. Statistik Tindak Pidana Korupsi dari Tahun 2013-2018	82
Tabel 6. Update Rekapitulasi Tindak Pidana Korupsi Tahun 2012-2018	83
Tabel 7. Jumlah Kasus Korupsi dan Kerugian Keuangan Negara yang Diselamatkan, Periode 2009 s.d Juli 2014	127
Tabel 8. Nilai Kerugian yang Diselamatkan KPK Tahun 2009-2014	127
Tabel 9. Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja KPK Tahun 2009-2014	128
Tabel 10. Jumlah Narapidana dan Tahanan di LAPAS	128
Tabel 11. Jenis Belanja dan Jumlah Biaya Rutan dan LAPAS	129

ABSTRAK

Korupsi telah lama menjadi persoalan yang amat sukar ditangani di Indonesia, hingga diibaratkan seperti “*corruption as way of live in Indonesia*”. Perbuatan korup telah mengakardan menjalar hampir disetiap instansi pemerintahan baik dipusat maupun didaerah. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan ekonomi dan akan lebih tepat jika ditangani dengan aturan yang berkarakter ekonomi sesuai prinsip *economic analysis of law*. Maka untuk itu perlu kita ketahui sejauh mana undang-undang korupsi dan penerapan hukumnya menerapkan prinsip *economic analysis of law*, dan bagaimana kebijakan formulasi tindak pidana korupsi sebagai *ius constituendum* dalam perspektif *economic analysis of law*. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yakni mengkaji UU korupsi yang berlaku, menjelaskan letak kelemahannya dan memberi masukan perbaikan hukum di masa depan dalam perspektif *economic analysis of law*, dengan menggunakan 4 pendekatan yang dikaji melalui studi pustaka dan dokumen, kemudian diolah dengan logika dekuktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa undang-undang korupsi belum sepenuhnya menerapkan prinsip *economic analysis of law*, penegakan hukumnya lebih fokus untuk memenjara pelaku korupsi daripada mengembalikan kerugian keuangan negara yang tercermin dari ketentuan aturan yang tidak saling mendukung satu sama lain sehingga sulit untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Maka untuk perbaikan di masa depan dalam perspektif *economic analysis of law* berupa menentukan jumlah kerugian keuangan negara yang dijadikan sebagai parameter dalam menetapkan sanksi pidana, mengintensifkan pidana mati dan menjadikan pidana denda sebagai pidana alternatif dengan tidak merumuskan jumlah nominalnya secara eksplisit di semua pasal tindak pidana namun dirumuskan dengan melipatgandakan 2-3 kalilipat dari jumlah yang dikorupsinya.

Kata Kunci: korupsi, kerugian keuangan negara, *economic analysis of law*, denda.

ABSTRACT

In Indonesia, Corruption has been a difficult problem to be solved and it can be said that “corruption as way of live in Indonesia”. It taken root and spread almost in every central government agency or any area. Besides, corruption is an economic crime and it would be better if it deals with the rules of economic characteristics in accordance with the principle of economic analysis of law. Therefore, it needs to be known to what extent the corruption law and the application of the law applies the principle of economic analysis of law, and how the formulation of crime corruption as ius constituendum in the perspective of economic analysis of law. It is a normative juridical research, namely reviewing the applicable corruption law, explaining the weaknesses and providing input on future legal improvements in the perspective of economic analysis of law. It uses 4 approaches studied through literature and document studies, then it is processed by using deductive logic. The result indicated that the corruption law has not fully implemented the principle of economic analysis of law and its law enforcement is more focus on imprisoning corruptors than restoring the state financial losses as reflected in provisions that do not support each other, so that it is difficult to achieve the expected goals. Therefore, for future improvements in the perspective of economic analysis of law in the form of determining the amount of state financial losses that are used as parameters in establishing criminal sanctions, intensifying capital punishment and making criminal fines an alternative by not formulating the nominal amount explicitly in all crime but formulated by multiplying 2-3 times the amount of the embezzled money.

Keywords: corruption, loss of state finances, economic analysis of law, fines.